

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, suatu bangsa dituntut mampu menyusun strategi pembangunan yang tepat dan berkelanjutan untuk memajukan bangsanya. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan sangatlah penting karena berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila kesejahteraan sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar warganya. Peningkatan kesejahteraan rakyat berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Setjen MPR RI, 2012:60). Amanat tersebut dapat dicapai melalui langkah-langkah yang efektif jika melibatkan Pemerintah, swasta, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat. Masing-masing elemen memiliki peran yang berbeda namun harus saling berintegrasi dan bersinergi agar lebih cermat dalam mengamati dinamika masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dalam menyusun manajemen pembangunan terutama pembangunan masyarakat desa. Tujuan pembangunan akan tercapai sesuai dengan harapan apabila partisipasi berlangsung secara komprehensif.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam berlimpah baik berupa rempah-rempah maupun hasil pangan seperti umbi-umbian, beras dan jagung. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dataran dan tanah yang subur yang tersebar di seluruh kepulauan di Nusantara merupakan potensi wilayah yang membuka kesempatan bagi warganya untuk bercocoktanam dan beternak sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kontribusi tersebut dibuktikan dengan tercapainya swasembada pangan pada era Orde Baru. Perkembangan variasi komoditas di rezim yang baru ini dapat terlihat ketika peningkatan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada beras saja melainkan jagung menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras, disamping itu jagung berperan sebagai pakan ternak bahan baku industri dan rumah tangga (Ditjen Tanaman Pangan 2002). Menurut Rachman (2008:3), kebutuhan akan komoditas jagung untuk bahan pangan, bahan pakan serta bahan baku industri terus meningkat. Dalam satu dekade terakhir produksi jagung nasional mengalami penurunan sekitar 0,94 % per tahun, sementara kebutuhan jagung cenderung meningkat, yakni 0,34 % per tahun. Kebutuhan jagung nasional untuk pakan ternak semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri peternakan yang menuntut kontinuitas pasokan bahan baku,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan sebagian dipenuhi dari jagung impor. Semakin meningkatnya volume impor jagung cukup beralasan mengingat harga jagung impor relatif rendah dibanding harga jagung di pasar domestik, disertai terjaminnya kualitas produk.

Kebijakan harga dasar jagung diawali tahun 1977/78, jauh setelah pemerintah menetapkan kebijakan harga dasar gabah/beras yang sudah dimulai sejak 1969. Penetapan harga dasar jagung dipandang penting karena produksi jagung saat itu cenderung meningkat dan ekspor jagung yang prospektif. Disamping itu, jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah padi, khususnya di daerah-daerah tertentu dan juga merupakan bahan baku utama untuk pakan. Upaya menstabilkan harga jagung di dalam negeri, mulai tahun 1977/78 pemerintah memberi mandat kepada Bulog melakukan pengadaan jagung yang bersumber dari petani dan impor. Pengadaan jagung tersebut kemudian disalurkan ke pasar dalam negeri dan ekspor. Sebelum tahun 1988, perdagangan antar propinsi dan antar pulau sepenuhnya dikendalikan oleh Bulog dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan permintaan dan pasokan. Harga dasar jagung pada tahun 1977/78 ditetapkan Rp40,00 per kg, dan kemudian menjadi Rp105,00 per kg selama kurun waktu 1981/82 – 1983/84, dan Rp110,00 per kg untuk tiga tahun berikutnya (1984/85 – 1987). Selanjutnya, untuk tahun 1988, 1989 dan 1990 harga dasar jagung terus mengalami perkembangan masing-masing tercatat Rp125,00/kg, Rp140,00/kg, dan Rp155,00/kg. Hasilnya, nisbah an harga dasar jagung terhadap harga dasar gabah kering giling (GKG) meningkat dari 0,56 menjadi 0,91 dalam periode 1977/78 – 1980/81, namun kemudian menurun menjadi 0,57 pada tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga dasar jagung dinilai tidak efektif dan kemudian dihentikan pada tahun 1990.

Kebijakan perdagangan lain untuk komoditas jagung adalah pengenaan tarif impor jagung dengan tujuan melindungi petani jagung dalam negeri. Besarnya tarif yang dikenakan selama tahun 1974 -1979 adalah 5 %, kemudian meningkat menjadi 10 % selama tahun 1980 – 1993. Tarif impor kembali diturunkan menjadi 5 % pada tahun 1994, dan pada tahun 1995 – hingga sekarang tarif impor jagung ditiadakan. Pemerintah selanjutnya memberlakukan kebijakan tarififikasi dan bentuk-bentuk proteksi namun semua bentuk proteksi namun hanya berdampak sementara terhadap kesejahteraan petani jagung selama sistem produksi jagung nasional belum mampu bersaing secara efisien.

Penurunan produksi jagung dan produktivitas tanaman pangan pada era baru reformasi diiringi dengan meningkatnya kemiskinan penduduk di wilayah pedesaan. Pada kenyataannya, jagung masih merupakan komoditas yang sangat potensial dan dapat meningkatkan pendapatan petani di desa.

Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Petani di pedesaan merupakan keluarga yang produktif karena tidak hanya kepala keluarga saja yang bekerja namun melibatkan istri dan melatih anak-anaknya yang sudah mulai beranjak remaja untuk terlibat dalam kegiatan usaha taninya. Hal tersebut mendukung terbentuknya kelompok tani (poktan) dan kelompok wanita tani (KWT).

Keterlibatan wanita dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga petani merupakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan . Berpedoman kepada pendapatan rumah tangga yang dapat dihasilkan oleh suami maupun istri (pola nafkah ganda), wanita memiliki

peluang kerja yang dapat menghasilkan pendapatan bagi rumah tangganya, sebagai upaya mengurangi kemiskinan di pedesaan. Hal tersebut juga dijumpai di desa Negeri Sakti. Istri-istri petani terjun sebagai pelaku usaha dan memiliki pendapatan. Peran serta wanita tani di Desa Negeri Sakti tersebut belum dapat dioptimalkan usaha yang dikelolanya karena beberapa faktor sebagai berikut: (1) keterbatasan modal, (2) rendahnya kesadaran istri petani untuk bergabung ke dalam KWT, (3) kurangnya pembinaan dari Pemerintah tentang pentingnya peran KWT dalam kehidupan petani. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masih tingginya jumlah petani miskin di desa tersebut.

Menurut Wahyuni (2003:22), kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dimaksudkan sebagai wadah komunikasi antar petani, serta antara petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan atau tolak ukur untuk memonitor dan mengevaluasi kinerjanya. Kinerja tersebut akan menentukan tingkat kemampuan kelompok.

Menurut Nasikun (1995), kemiskinan merupakan sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapital.

Fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang adalah kecenderungan memprioritaskan pembangunan di wilayah perkotaan daripada pedesaan, misalnya membangun industri di kota-kota. Semestinya, sasaran utama pembangunan adalah masyarakat pedesaan, dengan pembangunan fisik maupun nonfisik taraf hidup

masyarakat desa dapat meningkat melalui kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan suatu upaya di dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, penerapan teknologi dan berbagai permasalahan struktural lainnya (Hamim *et al.*,1996). Desa juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai motor penggerak kemajuan suatu negara berkembang. Sektor pertanian dan peternakan berperan besar dalam menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Francois Quesnay dalam Planck (1993:11)menyatakan bahwa petani dan penggarap merupakan satu-satunya kelas produktif dalam ekonomi nasional. Para petani merupakan kelompok pekerja yang terpenting di semua negara berkembang yang berorientasi pada ekonomi pasar.

Petani tanaman pangan dapat meningkatkan pendapatannya dengan cara beternak. Masyarakat petani padi juga dapat memaksimalkan pemanfaatan lahan kering dengan menanam jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubikayu (Nur, 2009:228). Upaya tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik apabila Pemerintah tidak mengakomodir kebutuhan para petani. Biasanya, masyarakat desa menggabungkan pekerjaannya sebagai petani dan peternak guna mengoptimalkan pendapatan dari lahan yang dimilikinya baik yang berukuran luas maupun sempit. Permasalahannya, petani terkadang mengalami hambatan secara individual, antara lain sulitnya mencari informasi tentang kesehatan ternak dan jenis-jenis hama serta cara menanggulangnya. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya hasil produksi pertanian dan peternakan.

Permasalahan-permasalahan yang banyak dihadapi petani mendorong petani untuk membentuk kerjasama dalam suatu kelompok. Hal tersebut merupakan fenomena dinamika sosial. Dinamika sosial membentuk pola tingkah laku kehidupan manusia untuk saling mengisi dan melengkapi, Seiring berjalannya waktu, maka berbagai macam polemik

yang terjadi di desa menjadi alasan bagi petani untuk berkolaborasi dan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi demi kemajuan bersama.

Masyarakat desa cenderung memiliki rasa solidaritas yang lebih kuat dalam bekerjasama untuk mencapai sesuatu yang positif. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan cara memberi wewenang pada setiap desa untuk membangun lembaga guna memperlancar kegiatan pertanian di desa serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan maupun usaha tani peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sehubungan dengan itu, pembangunan dikatakan tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi. Menurut Schoorl (1980:1-4), aspek yang paling penting dalam pembangunan suatu masyarakat adalah pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern. Desa sangat berperan penting dalam mempercepat pembangunan kota dengan memasok bahan mentah sebagai kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier.

Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup tinggi di sektor pertanian. Setiap kabupaten memiliki keunggulan komoditas yang spesifik. Para petani dapat mengoptimalkan lahan dengan cara berkebun, bertani, dan berternak. Potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat petani karena masih minimnya informasi dan pengetahuan petani mengenai metode-metode bercocok tanam dan beternak. Hal tersebut mengakibatkan masih rendahnya pendapatan per kapita dan masih banyak petani yang hidup di bawah garis kemiskinan khususnya di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2012 mencapai 1.253.834 ribu orang atau 16,18 % (BPS, 2012).

Petani di desa dihadapkan oleh permasalahan yang cukup sulit dalam hal menerapkan teknologi pengolahan hasil panen, pendistribusikan/pemasaran produksi, pengangkutan,

pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Hambatan tersebut dapat mengurangi keuntungan petani. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah untuk membentuk organisasi petani guna mempermudah akses Pemerintah untuk membina, melakukan pendampingan, dan penyuluhan serta penyebaran informasi. Langkah Pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola kegiatan usaha taninya secara komersil.

Kegiatan dan pertanian yang dikelola secara komersil diharapkan mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang maksimal. Keuntungan dan pendapatan yang maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan petani meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh petani (produsen) sangat menentukan keputusan produksi musim tanam berikutnya (Nur, 2009:228).

Kementrian Pertanian menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa yang menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan hasil kegiatan usaha tani pertanian tanaman pangan dan peternakan. Pemerintah pusat memberikan instruksi kepada seluruh petani di daerah untuk membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. (Sumber: Permentan No. 273 Tahun 2007)

Menurut De Vito dalam Hengki (2011:3), kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama serta memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya.

Pembentukan organisasi terstruktur seperti halnya Gapoktan tersebut berfungsi untuk mempermudah para petani dalam memperoleh pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan dari instansi terkait dalam upaya meningkatkan produksi pertanian secara luas. Peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Langkah tersebut merupakan salah satu terobosan Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan melalui sektor pertanian dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan pertanian tersebut merupakan salah satu pembangunan nasional di tingkat pedesaan dan bisa disebut sebagai *Community Development*. Pengertian umum *Community Development* menggambarkan sebuah proses yang diusahakan sendiri oleh penduduk dan bersama-sama dengan Pemerintah memperbaiki situasi ekonomi, sosial dan kultural desa, mengintegrasikannya dalam kehidupan bangsa dan membuatnya menjadi mampu memberikan sumbangan pada kemajuan nasional sepenuhnya” (B.Joerges dalam Planck, 1993:245).

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) merupakan kelompok individu yang bekerja sebagai petani guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dan memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian yang dikelolanya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada tahun 2012, di Kabupaten Pesawaran terdapat 115 Gapoktan dan jumlah Kelompok Tani mencapai 1.131 Kelompok Tani (Anonimus, 2012).

Gapoktan yang terdapat di Desa Suka Banjar, Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran terbentuk berdasarkan keinginan dan harapan yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di pedesaan. Fungsi Gapoktan secara

teoritis sudah cukup baik. Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 menyebutkan bahwa Gapoktan yang telah tumbuh harus berfungsi, sehingga dapat menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Berfungsinya Gapoktan tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Gapoktan mempunyai 5 (lima) fungsi sebagai berikut:

1. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Tani
2. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Pengelolaan
3. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi
4. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Pemasaran
5. Gapoktan berfungsi sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro

Gapoktan memiliki berbagai fungsi namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak masalah dan hambatan. Gapoktan dituntut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia lewat teknologi, sosial, dan sarana produksi lainnya akan tetapi secara individual anggota Gapoktan belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan seluruh fungsinya. Selain itu tidak ada pihak yang memberikan pengetahuan kepada Gapoktan secara berkala untuk membantu mereka mempersiapkan diri dalam melaksanakan fungsi tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota Gapoktan karena Gapoktan menghadapi hambatan yang cukup kompleks.

Menurut Dimiyati (1991), permasalahan yang dihadapi oleh kelembagaan petani, adalah sebagai berikut:

1. masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.

2. belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis.
3. aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
4. peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Hal tersebut adalah faktor penghambat internal yang dialami para petani di desa Negeri Sakti dan harus diatasi dengan cara memberi pemahaman kepada para petani sehingga petani di desa tersebut bisa lebih meningkatkan pendapatannya. Kemiskinan di lokasi penelitian masih sangat jelas terlihat, terbukti masih banyaknya pemuda yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya modal usaha di sektor pertanian membuat sebagian pemuda di desa tersebut memilih mencari pekerjaan ke luar kota. Kondisi pemukiman pun menjadi gambaran fisik yang nyata bahwa masyarakat di daerah tersebut masih jauh dari sejahtera. Rumah warga yang hanya terbuat dari gribik dan beratapkan jerami. Selebihnya untuk beberapa rumah dibangun semi permanen. Aspek pendidikan tidak dapat menjanjikan masyarakat untuk tumbuh lebih cerdas. Hal ini disebabkan persepsi masyarakat terhadap pendidikan cenderung pesimis. Keluarga lebih mengarahkan anak-anaknya untuk bercocok tanam dan beternak walaupun hasil yang didapat terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi petani dalam kaitannya dengan peran Gapoktan di wilayah Negeri Sakti adalah belum seluruh fungsi berjalan dengan optimal. Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha tani belum mampu mendorong peningkatan skala usaha dan produktivitas tanaman pertanian yang dikelolanya. Saat ini Gapoktan baru berhasil membantu petani untuk mempertahankan skala usaha dan produktivitas pertaniannya sehingga tidak terjadi penurunan serta tidak terjadi penurunan jumlah anggota karena beralih pekerjaan atau merasa tidak memerlukan organisasi Gapoktan.

Fungsi Gapoktan sebagai usaha pengelolaan masih belum optimal karena produk pertanian yang dihasilkan petani anggota Gapoktan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Hal tersebut disebabkan belum mampunya Gapoktan memberikan pengarahan dan memperkenalkan teknologi baru untuk mengelola produk pertanian menjadi bahan olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Misalnya mengolah singkong menjadi aneka makanan ringan yang berkualitas baik karena selama ini hanya diolah menjadi kerupuk *Putu Eyek-eyek* yang dilekukan KWT Mekar Jaya, mengolah buah pisang tidak hanya menjadi kue bolu seperti yang dilakukan KWT Sujiwangi, mengolah jagung menjadi produk olahan atau menjual jagung pipilan dalam kemasan yang baik, menyediakan tempat pemasaran produk anggota Gapoktan termasuk pasar ternak.

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi masih terbatas pada penyediaan pupuk dan alat-alat pertanian yang kuantitas dan kualitasnya masih terbatas. Hal tersebut mengakibatkan anggota Gapoktan harus mencari kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola usaha taninya dengan membeli di luar Gapoktan. Gapoktan akan mendapat keuntungan dari penyediaan sara dan prasarana produksi apabila mampu menyediakan kebutuhan petani. Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pemasaran masih belum optimal karena belum dapat menghimpun semua hasil pertanian untuk dipasarkan melalui satu tempat yaitu Gapoktan. Saat ini petani masih memasarkan sendiri hasil produksinya ke tempat yang sudah menjadi langganannya dengan harga yang bervariasi antar petani. Hal tersebut mengakibatkan seringkali terjadi kompetisi haraga yang tidak sehat antar petani karena petani yang dapat menjual hasilnya dengan harga lebih murah akan cepat memperoleh uang walaupun keuntungan sangat rendah.

Fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro masih belum berhasil karena kontribusi yang diberikan petani terhadap Gapoktan hanya berupa sumbangan rutin dan

tabungan sehingga peningkatan kekayaan Gapoktan sangat rendah. Gapoktan akan mampu menghimpun dana yang lebih besar apabila seluruh fungsi Gapoktan berjalan dengan baik sehingga petani mengandalkan teknologi pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, memasarkan produk pertaniannya pada Gapoktan. Ketergantungan petani pada Gapoktan menyebabkan besarnya kontribusi finansial yang diberikan pada Gapoktan.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kurangnya pendampingan pemerintah kabupaten dan instansi terkait sebagai pengawas dan menuntun Gapoktan untuk siap menjalankan 5 fungsinya. Keberhasilan Gapoktan di Desa Negeri Sakti sampai saat ini masih sebatas pada mempertahankan semangat petani untuk bertahan pada pekerjaannya dan membantu petani anggota Gapoktan untuk berhubungan dengan instansi terkait untuk memperoleh penyuluhan, pendampingan, atau bantuan dana. Tujuan dibentuknya KWT yaitu untuk memberikan wadah bagi para ibu-ibu untuk melakukan kegiatan usaha tani dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di desa Negeri Sakti

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas fungsi Gapoktan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung ?
2. Apa saja faktor penghambat program Gapoktan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis fungsi Gapoktan Sulahudin di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat program Gapoktan Sulahudin yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian tersebut :

1. secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi empirik dan pengetahuan seputar pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui Gapoktan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti tentang peranan lembaga yang berorientasi pada kelompok masyarakat.